

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Wilayah Administrasi

Kota Padang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Barat dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah 1.414,96 km² yang terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut dengan luas masing-masing adalah 694,96 km² (daerah efektif termasuk sungai yaitu 205 km² sementara untuk daerah berbukit termasuk sungai yaitu 486,209 km²) dan 720 km² serta memiliki panjang pantai 68,13 km (diluar pulau-pulau kecil) dan memiliki 19 pulau (*Zoning Regulation Daerah Rawan Gempa*, 2011). Secara geografis Kota Padang terletak diantara 00⁰44'00"-01⁰08'35" LS dan 100⁰05'05"-100⁰34'09" BT (RTRW Kota Padang 2010-2030). Kota Padang memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan yakni Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh serta Kecamatan Koto Tengah (**Gambar 1.3**). Adapun batas administrasi Kota Padang yakni :

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat : Samudra Indonesia dan Kepulauan Mentawai
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Menurut topografinya Kota Padang merupakan perpaduan dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian bervariasi 2 m – 200 m dari permukaan laut (mdpl) serta dilalui oleh 17 sungai dengan 3 sungai besar dan bermuara ke Samudera Hindia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang termasuk daerah rawan bencana. Adapun bencana yang pernah terjadi di Kota Padang adalah bencana gempa bumi, bencana longsor, bencana banjir dan bencana tsunami (RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030).

4.1.2 Kondisi Fisik Dasar

A. Topografi

Kota Padang terdiri dari wilayah pantai meliputi seluruh wilayah yang berhadapan dengan Samudra Hindia; wilayah dataran rendah terletak di sekitar pusat Kota Padang dan sudah berkembang pesat; dan wilayah dataran tinggi meliputi wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan dan melingkari Kota Padang. Sebagian besar topografi Kota Padang memiliki tingkat ketererangan lahan rata-rata >40%. Ketinggian Kota Padang bervariasi mulai 0 m dpl - >1.000 m dpl (**Tabel 4.1** dan **Gambar 4.1**).

Tabel 4.1 Persebaran kawasan berdasarkan ketererangan

No	Jenis Ketererangan	Persebaran Kawasan
1	Ketererangan 0-2%	(Kec.) Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kec. Kuranji, Kec. Padang Selatan, Kec. Lubuk Begalung dan Kec. Koto Tangah.
2	Ketererangan 2-15%	Kec. Koto Tangah, Kec. Pauh dan Kec. Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang
3	Ketererangan 15-40%	Kec. Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kec. Koto Tangah.
4	Ketererangan >40%	di bagian Timur Kec. Koto Tangah, Kuranji, Pauh, dan bagian Selatan Kec. Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kec. Bungus Teluk Kabung

Sumber: RTRW Kota Padang, 2010-2030

Tabel 4.1 menunjukkan kecamatan yang terdapat di ketererangan >40% sangat beresiko terjadi bencana longsor dimusim penghujan dan jika terjadi gempa bumi. Sementara untuk bencana tsunami terletak di ketererangan 0-2%.

B. Geologi

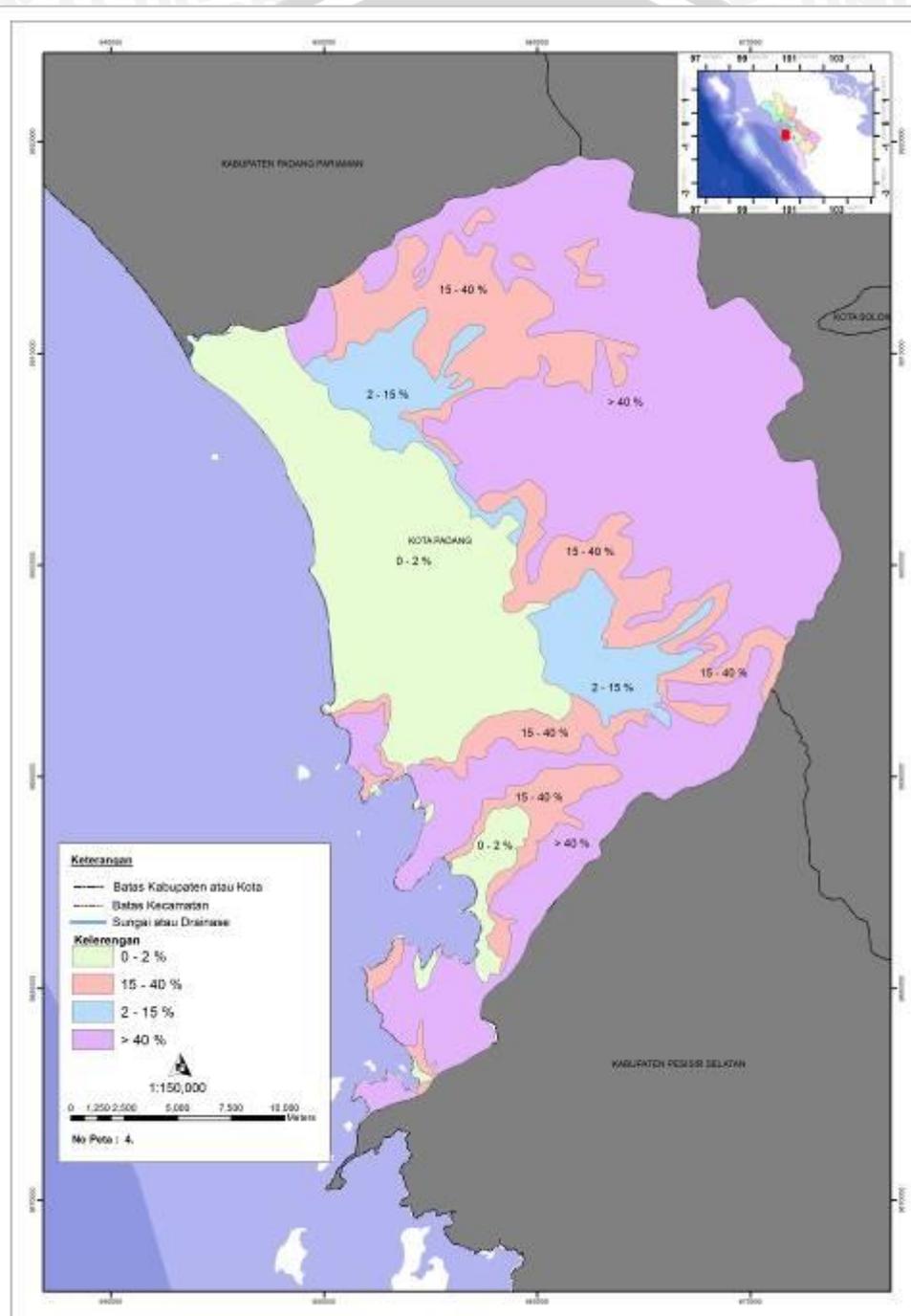
Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, geologi Kota Padang dibentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Ada delapan jenis batuan tersebut yakni aliran yang tak teruraikan (Qtau); alluvium (Qal); kipas alluvium (Qt); tufa kristal (QTt); andesit (Qta) dan tufa (QTP); batu gamping (PTIs); fillit, batu pasir, batu lanau meta (PTps).

C. Hidrologi

Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar dan kecil, tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil). Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang ada di Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut sehingga mengakibatkan cukup banyak bagian Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan.

D. Oceanografi

Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang ± 84 km dan luas kewenangan pengelolaan perairan ± 72.000 Ha dan 19 pulau-pulau kecil. Secara fisik administratif ada 6 kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pantai barat Kota Padang yaitu: Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung (RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030).



Gambar 4. 1 Peta Kelerengan Kota Padang

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

4.1.3 Kependudukan

Kota Padang yang terdiri dari sebelas kecamatan yang pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak 844.316 jiwa (**Tabel 4.2**)

Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan
Bungus teluk kabung	100.78	23142	229.6288946
Lb kilangan	85.99	49751	578.5672753
Lb begalung	30.91	108008	3494.273698
Padang selatan	10.03	57386	5721.435693
Padang timur	8.15	77932	9562.208589
Padang barat	7.00	46060	6580
Padang utara	8.08	69275	8573.638614
Nanggalo	8.07	57731	7153.77943
Kuranji	57.41	128835	2244.121233
Pauh	146.29	60553	413.9243967
Koto tengah	232.25	165633	713.1668461
Jumlah	694.96	844316	1214.913089

Sumber: Padang dalam angka, 2012

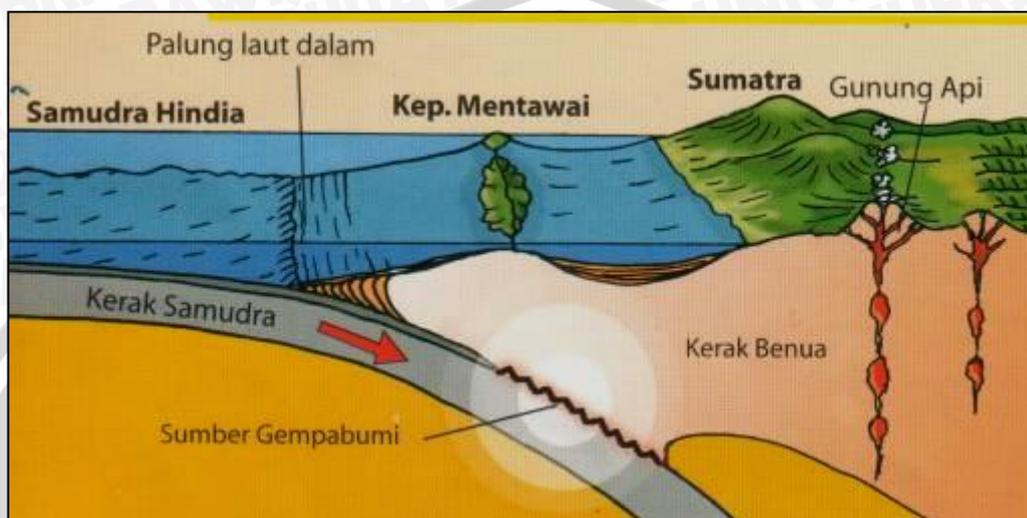
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak sebesar 165.633 jiwa di Kecamatan Koto Tengah sedangkan penduduk terkecil sebanyak 23.142 jiwa di Kecamatan Lubuk Kilangan. Penduduk yang tinggal di daerah rawan tsunami terdapat ditujuh kecamatan seperti Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki total penduduk 527.308 jiwa.

4.2 Potensi Bencana di Kota Padang

Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, ada empat potensi bencana alam di Kota Padang yaitu potensi rawan gempa bumi, rawan tsunami, rawan longsor dan rawan banjir. Adapun fokus bencana dalam penelitian ini berupa bencana tsunami. Hal itu dikarenakan bencana tsunami merupakan ancaman terbesar dari bencana lainnya yang telah mempengaruhi keinginan pindah masyarakat dan membuat harga lahan menjadi turun (Trisia Niken, et.all, 2010).

4.2.1 Rawan gempa bumi

Secara regional, Propinsi Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa Bumi Indonesia No. III (RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030). Gempa bumi pada jalur penunjaman di Bagian Barat Pantai Sumatera (Mentawai) merupakan gempa bumi tektonik yang bersumber dari laut (**Gambar 4.2**).



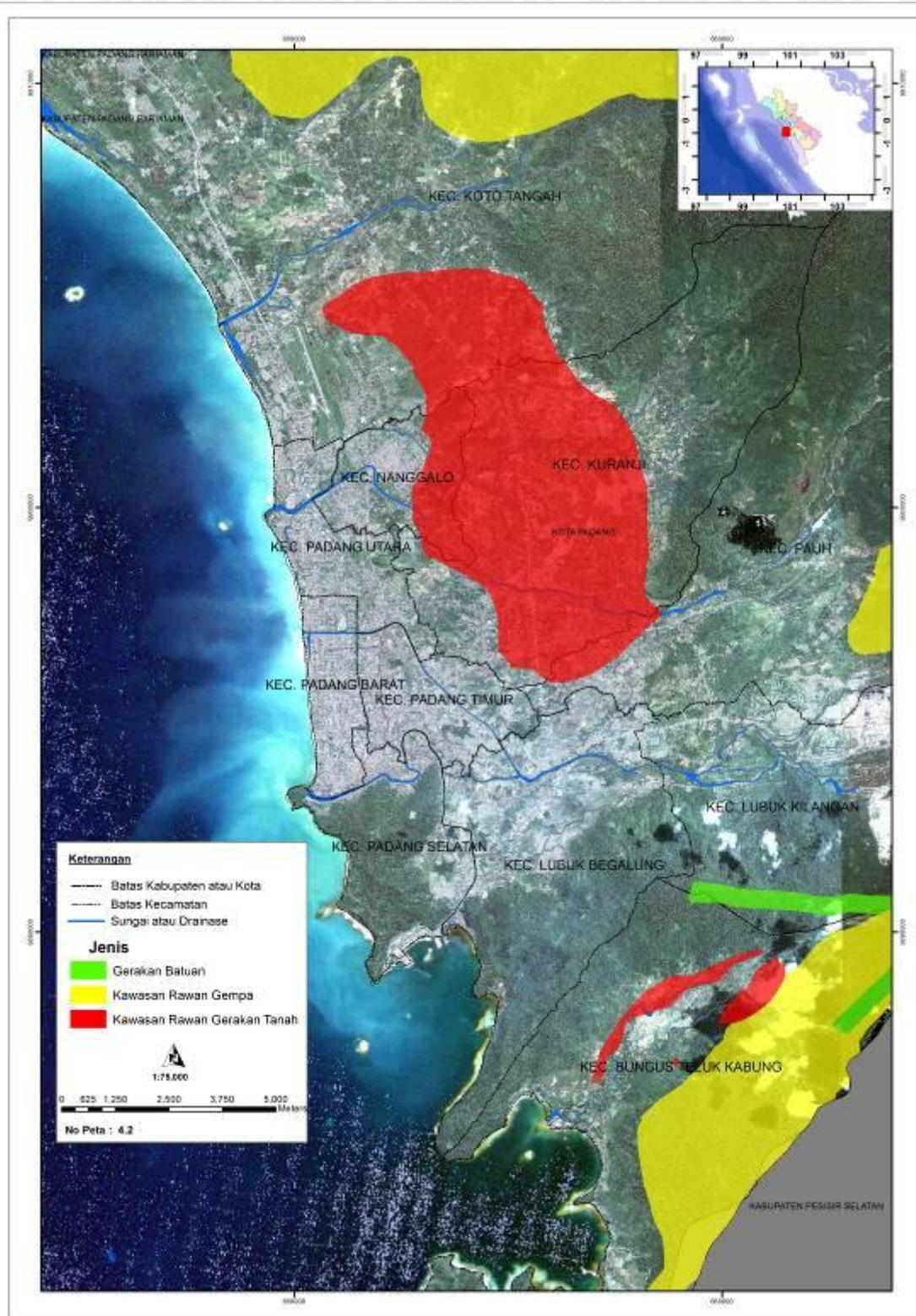
Gambar 4.2 Ilustrasi Penampang Tektonik Pulau Sumatera

Sumber: Feasibility Study dan DED Prototype Bangunan Evakuasi Bencana Gempa dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Kota Padang sangat rentan terhadap bencana gempa karena berada di pertemuan lempeng-lempeng tektonik (lempeng IndoAustralia dan lempeng Euraia) sehingga kondisi kawasan ini memiliki ragam geologi yang kompleks (Zoning Regulasi Daerah Rawan Gempa, 2011). Kondisi tersebut menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Gempa bumi yang merusak Kota Padang dapat dibedakan menjadi dua yaitu gempa bumi yang berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia di sebelah barat Sumatera; dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif mendatar Sumatera. Sejak tahun 1822 hingga 2009 setidaknya telah terjadi 14 kali kejadian gempa bumi kuat dan merusak di Sumatera Barat dan diantaranya dapat menyebabkan tsunami (RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030). Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, intensitas gempa bumi (MMI) Kota Padang mempunyai tingkat kegempaan berkisar antara V – VII (skala MMI) yaitu

- 1) Skala V – VI: tersebar dominan ke bagian barat laut-tenggara yang meliputi daerah bagian tengah hingga timur laut Kota Padang.

- 2) Skala VI – VII: tersebar mulai dari bagian barat laut-tenggara, bagian tengah meliputi daerah Pasir Jambak, Cupak hingga terus ke arah tenggara Kota Padang.



Gambar 4. 3 Peta Rawan Gempa Bumi

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

Gambar 4.3 menunjukkan di Kota Padang terdapat tiga jenis gempa yaitu warna merah untuk kawasan rawan gerakan tanah, warna kuning untuk kawasan rawan gempa dan warna hijau untuk kawasan rawan gerakan batuan. Dari ketiga jenis rawan gempa tersebut, untuk kawasan rawan gerakan tanah berada pada kawasan perkotaan yakni Kecamatan Kuranji, Pauh, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan serta Kecamatan Koto Tangah sehingga sangat beresiko terkena dampak bencana gempa bumi.

Pada Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung bencana gempa bumi dapat menyebabkan bencana tsunami karena kecamatan-kecamatan tersebut terletak di sepanjang pesisir barat Kota Padang dengan permukaan yang sangat landai $>5\%$

4.2.2 Rawan Tsunami

Kota Padang terletak di Kawasan Megathrust Mentawai artinya berpotensi tsunami (BPBD Kota Padang, 2010). Berdasarkan kajian ahli geologi, sumber gempa yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada dekat Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera berpotensi menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Propinsi Sumatera Barat (**Gambar 4.4**).



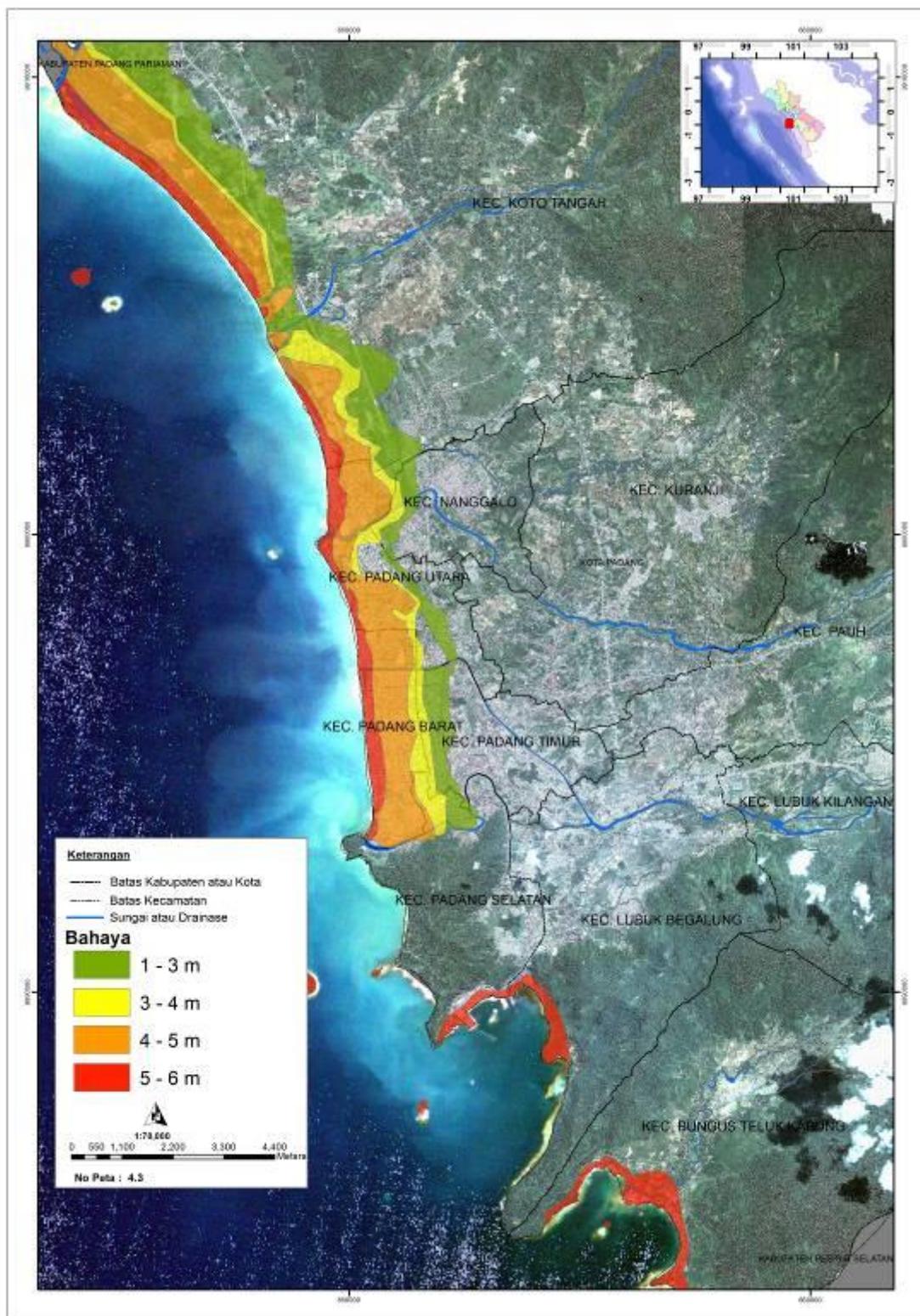
Gambar 4. 4 Zona Merah Atau Zona Daerah Rawan Bahaya Tsunami

Gambar 4.4 menunjukkan kepadatan bangunan pada zona merah dengan kepadatan penduduk di tujuh kecamatan mencapai 32465.92 km²/jiwa. Letak Kota Padang yang berbatasan langsung dengan laut terbuka dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Kota Padang sebagai salah satu kota paling rawan bahaya terhadap gelombang tsunami (**Gambar 4.5**). Wilayah daerah rawan bencana tsunami di Kota Padang berdasarkan kemiringan lereng (**Tabel 4.3**).

Tabel 4.3 Wilayah daerah tsunami berdasarkan kemiringan lereng

Kemiringan Lereng	Kawasan	Kategori
0-2%	Kec. Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tengah dan sebagian Kec. Kuranji	Daerah rawan tsunami sehingga perencanaan transportasi wilayah kota harus memberikan akses yang lebih baik menuju ke wilayah utara yang lebih aman dari limpasan gelombang tsunami.
2-15%	Kec. Koto Tengah, Pauh dan Lubuk Kilangan	Daerah yang relatif aman (kelerengan tinggi) untuk dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi warga dari bencana tsunami terutama pada daerah-daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 10% dimana kemiringan 10% akan cukup mengurangi kecepatan landaan gelombang tsunami
15-40%	Kec. Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kec. Koto Tengah	Lokasi evakuasi bencana tsunami yang cukup disarankan
>40%	Wilayah ini tersebar di bagian timur Kec. Koto Tengah, Kuranji, Pauh, dan bagian selatan Kec. Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kec. Bungus Teluk Kabung	lokasi yang paling aman sebagai lokasi evakuasi terhadap bencana tsunami

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030



Gambar 4.5 Peta Rawan Tsunami
Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

Gambar 4.5 menunjukkan Kota Padang dibagi menjadi empat zona yaitu zona merah merupakan zona dengan resiko bahaya tsunami tinggi, zona orange merupakan

zona dengan resiko bahaya tsunami sedang, zona kuning merupakan zona dengan resiko bahaya tsunami rendah, zona hijau merupakan zona aman tsunami (**Tabel 4.4**).

Tabel 4. 4 Persebaran kecamatan yang berpotensi tsunami berdasarkan zonanya

Zona	Persebaran
zona merah (bahaya tsunami tinggi)	Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Koto Tengah
zona orange (bahaya tsunami sedang)	Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Koto Tengah
zona kuning(bahaya tsunami rendah)	Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat
zona hijau (zona aman tsunami)	Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

4.2.3 Rawan Banjir

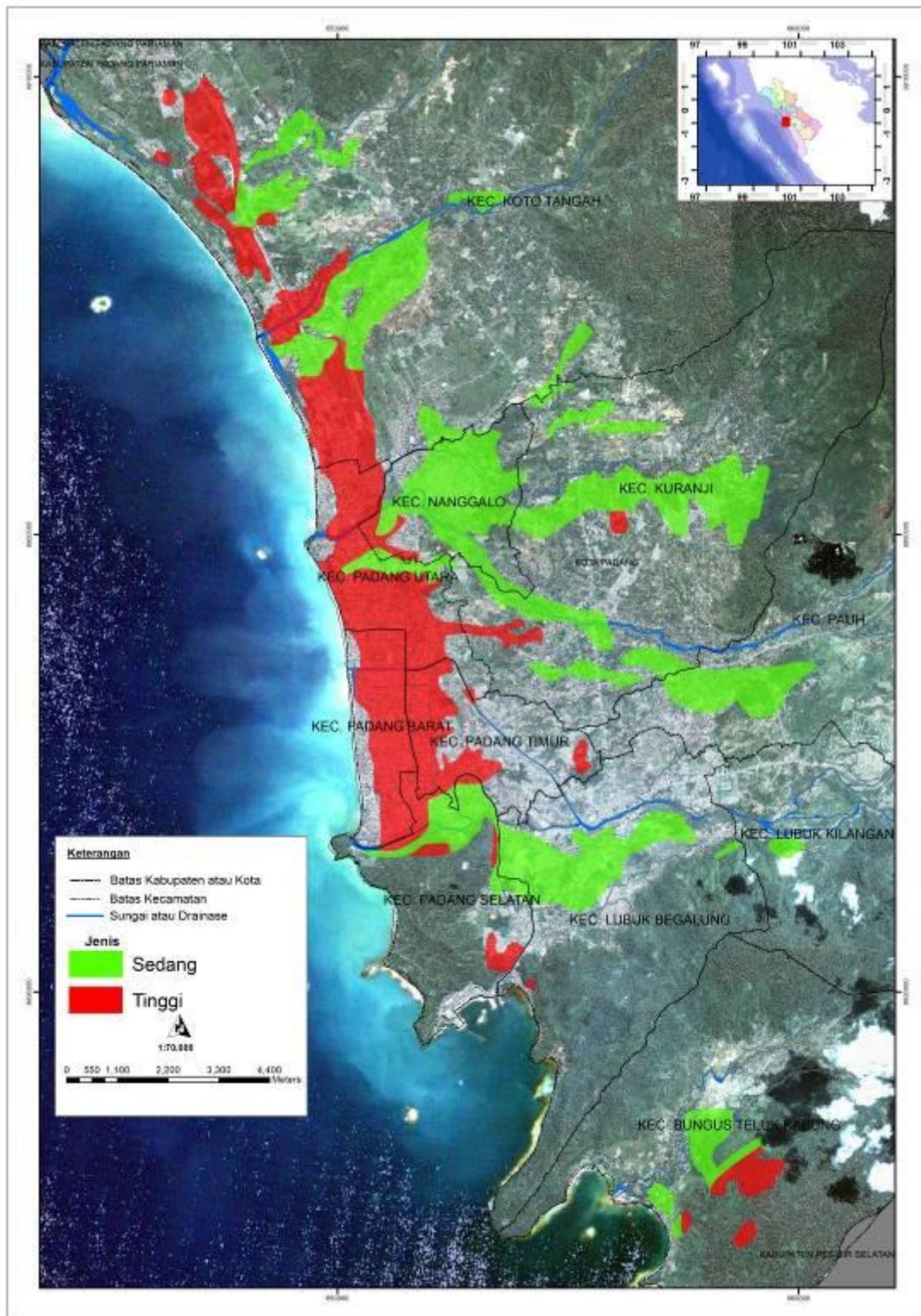
Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010, wilayah yang diidentifikasi rawan bencana banjir ada lima kecamatan yakni Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung (**Tabel 4.5**).

Tabel 4. 5 Lokasi yang rawan bencana banjir

Kecamatan	Kelurahan
Kecamatan Koto Tengah	Lubuk Minturun, Simpang Kalumpang, Padang Sarai, Dadok Rawan Panjang dan sekitarnya, Ikur Koto, Anak Air, dan Padang Sarai
Kecamatan Nanggalo	Lapai, Siteba, Maransi, Gunung Pangilun
Kecamatan Kuranji	Ampang, Gunung Sarik, Andalas
Kecamatan Padang Timur	Simpang Haru
Kecamatan Lubuk Begalung	Parak Laweh dan Arai Pinang

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

Tabel 4.5 menunjukkan tujuh belas kelurahan di lima kecamatan di Kota Padang beresiko terjadi bencana banjir. Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, daerah-daerah yang berpotensi rawan banjir di Kota Padang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu bahaya banjir sedang dan bahaya banjir tinggi. Untuk daerah yang termasuk banjir tinggi terletak di Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Barat serta Kecamatan Padang Timur (**Gambar 4.6**). Hal yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, sistem drainase yang kurang baik khususnya di kawasan perumahan serta kurangnya daerah resapan.



Gambar 4. 6 Peta Rawan Banjir
Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

4.2.4 Rawan Geologi (Longsor dan gerakan tanah)

Berdasarkan *Zoning Regulation* Daerah Rawan Gempa Tahun 2011, rawan bencana geologi antara lain gerakan tanah dan rawan longsor. Struktur geologi Kota

Padang terdiri dari 2 jenis yaitu sesar naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sementara sesar geser jurus terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Akibat adanya kedua sesar tersebut sehingga berpotensi terjadi gerakan tanah. Wilayah yang rawan gerakan tanah adalah di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Selain gerakan tanah, rawan bencana geologi lain di Kota Padang adalah longsor. Gerakan Tanah di Kota Padang tersebar di dataran dengan kondisi stabil dan kondisi tidak stabil (**Tabel 4.6**).

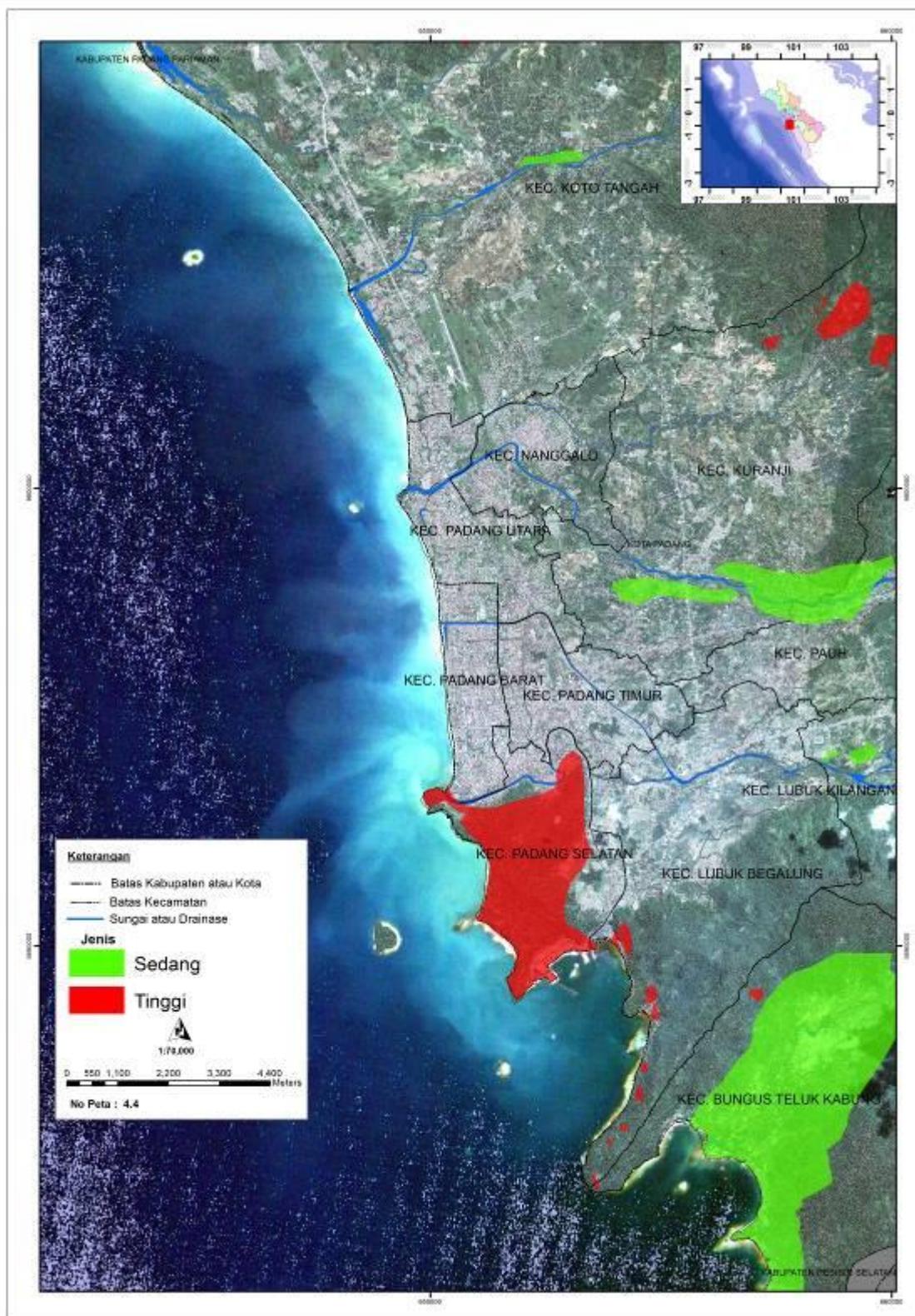
Tabel 4. 6 Persebaran wilayah rawan longsor berdasarkan jenis dataran

Jenis dataran	Kategori	Persebaran Wilayah
Kondisi stabil (s)	a. Terdapat pada daerah dataran b. Tersusun oleh endapan aluvial, rawa, kipas aluvial, pematang pantai dan dataran pantai, berupa lempung-pasir, kerikil-kerakal, lepas-agak padat c. Sudut lereng 0-5% berupa dataran dengan elevasi 0-5 m (dml), tipe erosi limpasan-alur, serta runtuh tebing sungai sebagai akibat limpasan aktifitas aliran air sungai	sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota Padang
Kondisi tidak stabil (TS) a. Tingkat rendah-sedang (R-S)	a. Terdapat pada daerah barat laut hingga ke arah selatan b. Tersusun oleh endapan dataran aluvial berupa endapan vulkanik (dominan) berupa lahar, tuf dan kolumium, sifat endapan padat - sangat padat, padat, c. Sudut lereng 5-30 % berupa dataran bergelombang dengan elevasi 5-10 m (dml), tipe erosi alur-lembah (runtuh tebing sungai) akibat aktifitas aliran air permukaan dan sungai	bagian timur laut - tenggara, sedikit berada pada bagian barat Kota Padang
b. Tingkat sedang-stabil (S-T)	a. Terdapat pada daerah dataran-perbukitan b. Tersusun oleh batuan tua yang terdiri dari malihan/metamorf, sifat endapan sangat padat, mudah tererosi oleh aliran air permukaan dan terdapat dinding dengan >30% hingga tegak lurus, dapat runtuh. c. Tipe erosi limpasan-galur-jurang.	Meliputi bagian timur laut hingga tenggara, dan selatan Kota Padang.

Sumber: RTRW Kota Padang 2010-2030

Tabel 4.6 memperlihatkan potensi longsor terletak di wilayah bagian timur laut, tenggara, selatan dan barat Kota Padang. (**Gambar 4.7**) memperlihatkan daerah rawan longsor di Kota Padang. Daerah rawan longsor dapat dikategorikan menjadi dua yaitu zona merah termasuk kategori rawan longsor tinggi sedangkan zona hijau termasuk kategori rawan longsor sedang. Untuk wilayah yang termasuk rawan longsor tinggi terdapat di Kecamatan Padang Selatan karena dipengaruhi oleh topografi dan

kelerengan yang curam sedangkan untuk wilayah yang termasuk rawan longsor sedang terdapat di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.



Gambar 4. 7 Peta Rawan Geologi

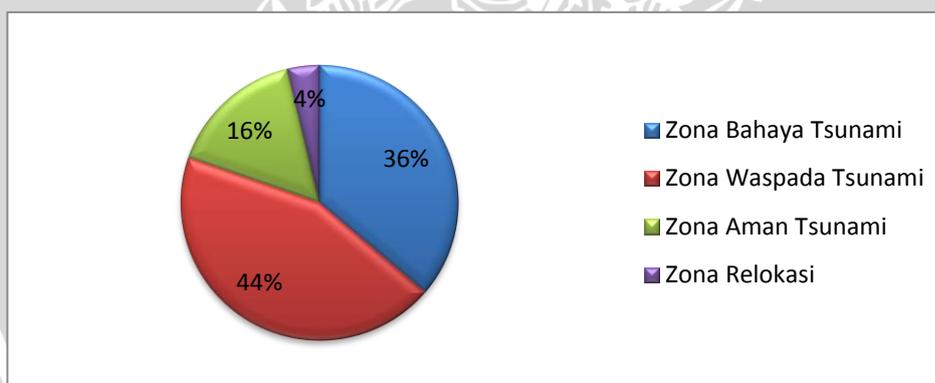
Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

4.3 Informasi yang diberikan Pemerintah dalam Pengurangan Resiko Bencana

Tingginya tingkat resiko bencana di Kota Padang mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun berbagai rencana pengurangan resiko bencana seperti peta rawan tsunami, rencana jalur evakuasi dan tempat evakuasi tsunami, *building code*, master plan daerah rawan bencana Kota Padang, simulasi sistem peringatan dini, dan lain-lain untuk meminimalkan dampak kerusakan dan korban jiwa akibat tingginya resiko bencana di Kota Padang.

4.3.1 Peta Rawan Tsunami

Tingginya jumlah populasi masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di wilayah pesisir barat Kota Padang semakin meningkatkan resiko terhadap bahaya bencana tsunami. (Tabel 4.2) Pengurangan resiko bencana dalam rencana tata ruang yang salah satunya di wujudkan dengan peta daerah rawan bencana tsunami. Oleh karena itu BPBD Kota Padang membuat peta zona bahaya tsunami pada tahun 2010 (Gambar 1.2). (Gambar 1.2) menunjukkan bahwa bahaya tsunami Kota Padang diklasifikasikan menjadi empat zona yaitu merah zona bahaya tsunami, kuning zona waspada tsunami, hijau zona aman tsunami dan ungu sebagai zona relokasi (Gambar 4.8)



Gambar 4. 8 Persentase Luas Berdasarkan Zonanya

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa luas yang paling besar terdapat pada zona waspada sebesar 44% sedangkan zona terkecil terdapat pada zona relokasi sebesar 4%.

4.3.2 Peta jalur evakuasi tsunami

Peta jalur evakuasi adalah salah usaha BPBD Kota Padang yang bekerja sama dengan Mercicorp, GTZ, PMI Kota Padang, KSR unit proklamator dalam mengurangi resiko bencana tahun 2010. Dalam peta jalur evakuasi tsunami, dibagi kawasan yang terkena dampak menjadi enam sektor pada (Tabel 4.7)

Tabel 4. 7 Pembagian sektor berdasarkan peta jalur evakuasi

Pembagian Sektor	Lokasi
Sektor 1	Kec.Koto tengah, Kel. Pasie Nan tigo
Sektor 2	Kec. Koto tengah, Kel. Parupuak tabing dan Kel. Bungo pasang
Sektor 3	Kec. Padang Utara dan Kec. Nanggalo
Sektor 4	Kec. Padang Utara. Kel.Lolong belanti dan Kel. Gunung Pangilun
Sektor 5	Kec. Padang barat, Kel. purus, Kel. Olo Kel. Kampung Jao
Sektor 6	Kec. Padang Barat, Kel. Berok nipah, Kel. Belangkang Tangsi. Kel. Kampung Pondok

Sumber: Peta jalur evakuasi, 2010

(Tabel 4.7) menjelaskan bahwa pembagian sektor dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami peta evakuasi secara detail. Peta jalur evakuasi tsunami tersebar di sepanjang pesisir barat Kota Padang pada Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur. Peta jalur evakuasi tsunami dipasang pada persimpangan jalan dan kantor kelurahan agar masyarakat memahami tempat evakuasi apabila terjadi bencana tsunami.



Gambar 4. 9 Peta Jalur Evakuasi Kota Padang

Sumber: Hasil survei primer dan sekunder, 2013

(Gambar 4.9) menunjukkan adanya pemasangan peta jalur evakuasi di pinggir jalan dilakukan Pemerintah Kota Padang dan KOMunitas siaGA tsunaMI (KOGAMI) untuk meminimalisir korban jiwa. Pemasangan peta jalur evakuasi tanpa disertai dengan penjelasan yang memadai akan menimbulkan salah pengertian bagi yang membaca, terutama pada masyarakat berpendidikan rendah.

4.3.3 Surat gubernur Sumatera Barat tentang gempa dan tsunami

Masyarakat pesisir barat Kota Padang diresahkan karena keluarnya surat gubernur tentang gempa dan tsunami pada Bulan April sampai Bulan Juni tahun 2012. Hal tersebut disebabkan isi surat edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, tanggal 27 April 2012 yang berisi tentang *Siaga Darurat Gempa Bumi dan Tsunami (Gambar 4.10)*.



Gambar 4. 10 Surat edaran status siaga darurat gempa bumi dan tsunami Wilayah Sumatera Barat

Beredarnya surat pernyataan dari gubernur Sumatera Barat yang dimuat oleh media massa pada Bulan April 2012, membuat masyarakat yang bermukim di pesisir barat Kota Padang takut dan cemas, karena masyarakat menganggap surat edaran tersebut bersifat tindakan reaktif. Padahal, bencana gempa bumi dan tsunami berbeda dengan bencana lainnya seperti banjir, longsor dan gunung meletus yang bisa diprediksi kejadiannya.

4.3.4 Simulasi dan sistem peringatan dini

Pemerintah Kota Padang mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat karena peringatan bisa diberikan tepat waktu dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena resiko bahaya tsunami. Salah satu contoh dari sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat adalah sirine. Sistem peringatan dini dipasang oleh Pemerintah Kota Padang disetiap bangunan yang bersifat publik misalnya seperti bangunan pendidikan, kantor, rumah sakit, dan lain sebagainya (**Gambar 4.11**). Hal itu dilakukan agar masyarakat tanggap terhadap bahaya tsunami.



Gambar 4. 11 Sirine sistem peringatan dini di Kota Padang

Sumber: berita.plasa.msn.com

Terkait dengan sistem peringatan dini, BPBD Kota Padang pernah melakukan simulasi pada tahun 2012. Simulasi dilakukan untuk memberi pemahaman, kesiapan serta melatih masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan kalau terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Simulasi dilakukan pada jam-jam sibuk untuk mengetahui berapa lama semua warga menempuh jalur evakuasi hingga sampai zona aman atau penampungan pada saat jalan padat (**Gambar 4.12**).



Gambar 4. 12 Simulasi tsunami di Kota Padang serta jalur evakuasi tsunami

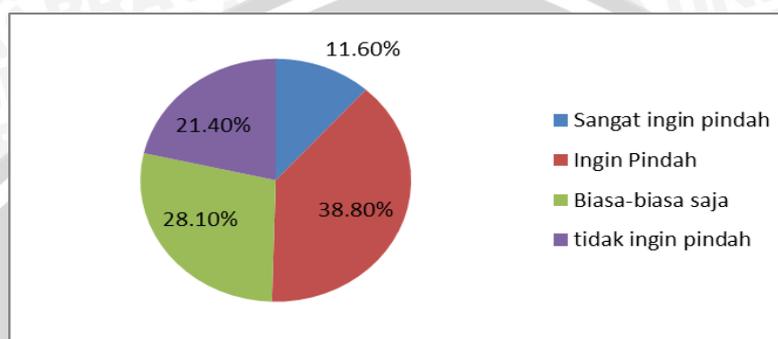
Gambar 4.12 merupakan salah satu simulasi tsunami yang dilakukan di sekolah dasar oleh Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang KOMunitas siaGA tsunaMI (KOGAMI) melaksanakan jambore siaga bencana sekolah (JAMSIBES) sejak tahun 2009-2012 sebanyak 3 kali. JAMSIBES diikuti oleh sekolah dari tingkat SD-SMA yang berasal dari daerah pesisir pantai. Selain itu, KOGAMI melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan melaksanakan *workshop* yang diikuti oleh 100 orang di setiap kelurahan. Hal itu dilakukan untuk memberikan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat

4.4 Dampak dari Desiminasi dalam Pengurangan Resiko Bencana

Setelah beredarnya isu gempa dan tsunami di Kota Padang tahun 2010, masyarakat takut untuk bermukim di daerah pinggir pantai sehingga menyebabkan keinginan pindah penduduk secara signifikan dan harga tanah turun (Trisia Niken, et.all, 2010). Terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi bermukim yaitu keinginan pindah (Trisia Niken, *et.all*, 2010), jarak (Kelley, 2003), struktur keluarga, kepemilikan rumah, pendidikan (Lee, *et.all*, 2007) serta pengetahuan informasi (Bintarto, 1987). Berdasarkan variabel tersebut maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis tabulasi silang dengan uji *chi-square* dan analisis korespondensi untuk mengetahui keterkaitan antar faktor dari orientasi bermukim untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

Peta zona bahaya tsunami yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang menyebabkan masyarakat yang bermukim pada zona tersebut takut dan ingin berpindah ke lokasi yang aman. Kondisi ini jika ditinjau dari pemahaman terhadap bencana tsunami sangat baik, masyarakat memahami bahaya yang mengancam di sekitarnya. **Gambar 4.12** menunjukkan bahwa persentase masyarakat pesisir barat Kota

Padang yang ingin pindah sebesar 38,80%. Kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat mengalami trauma dan takut terjadi tsunami. Keinginan pindah juga disebabkan oleh distorsi informasi yang diterima oleh responden terkait dengan peta rawan tsunami, peta jalur evakuasi dan peta tempat evakuasi. Namun 21,40% masyarakat tidak ingin pindah karena menganggap bencana merupakan bagaian dari sebuah takdir yang harus diterima.



Gambar 4. 13. Keinginan pindah terkait peta rawan tsunami

Gambar 4.13 merupakan peta perubahan orientasi bermukim di Kota Padang yang ditunjukkan oleh arah perpindahan penduduk dapat dilihat pada (**Tabel 4.8**)

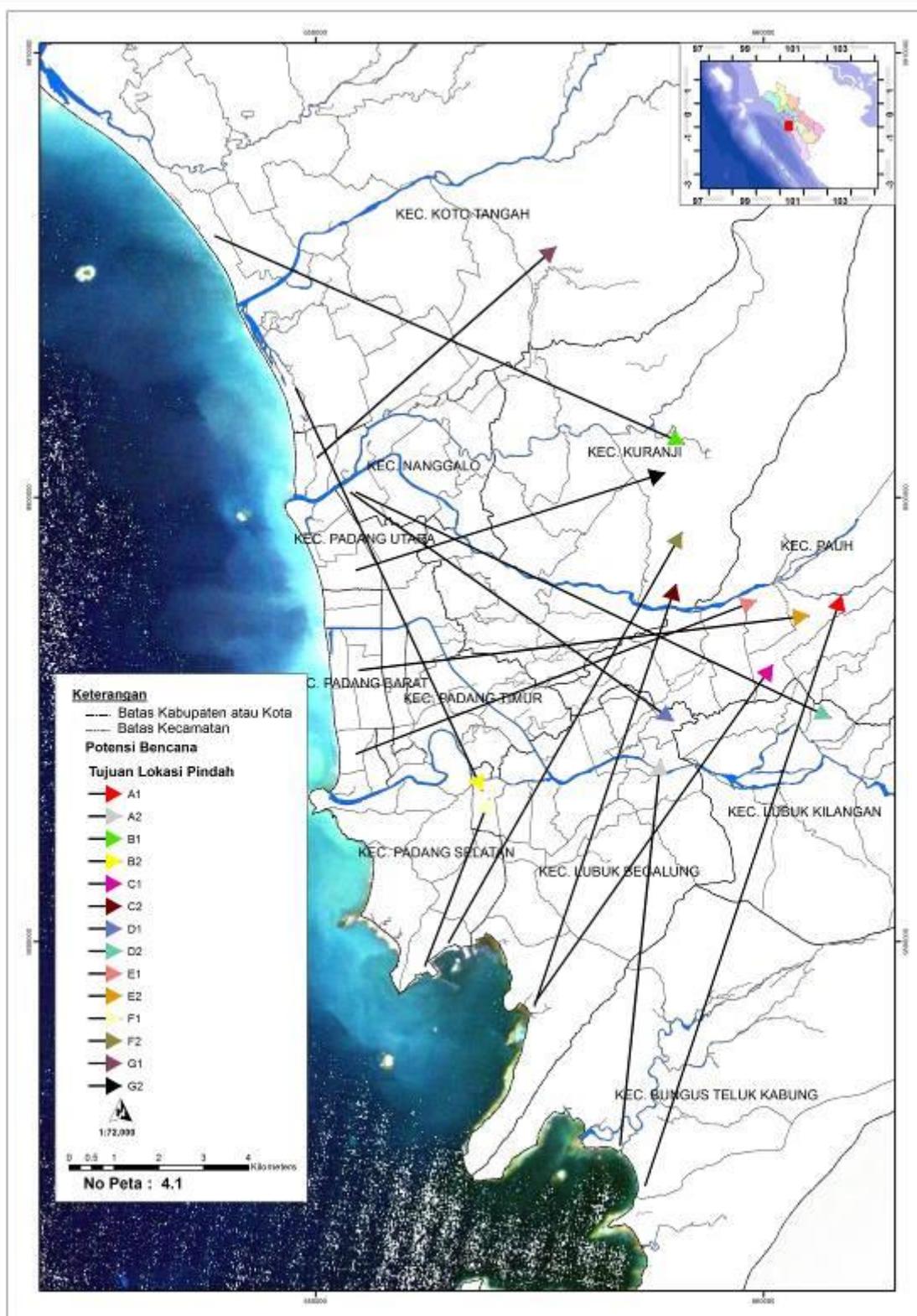
Tabel 4. 8 Arah Perpindahan penduduk

No	Asal	Tujuan	Jarak (km)
1	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	A1 = Kelurahan Limau Manis A2 = Kelurahan Kampung Baru	25.42 18.20
2	Kecamatan Koto Tengah	B1 = Kelurahan Kuranji B2 = Kelurahan Koto Baru	15.94 12.14
3	Kecamatan Lubuk Begalung	C1 = Kelurahan Limau Manis C2 = Kelurahan Kuranji	12.45 14.44
4	Kecamatan Nanggalo	D1 = Kelurahan Padang Besi D2 = Kelurahan Cengkeh	12.25 15.49
5	Kecamatan Padang Barat	E1 = Kelurahan Kapalo Koto E2 = Kelurahan Limau Manis	10.11 12.82
6	Kecamatan Padang Selatan	F1 = Kelurahan Koto Baru F2 = Kelurahan Kuranji	6.23 14.20
7	Kecamatan Padang Utara	G1 = Kelurahan Lubuk Minturun G2 = Kelurahan Kuranji	12.80 13.54

Sumber: Hasil analisis, 2013

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa lokasi yang ingin dituju masyarakat untuk berpindah berdasarkan kusioner terdapat delapan kelurahan yaitu Kelurahan Kuranji, Kelurahan Limau Manis, Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Kapalo Koto, Kelurahan Cengkeh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kelurahan Padang Besi dan Kelurahan Kampung Baru . Untuk mengukur jarak menggunakan network analisis dengan GIS sehingga dapat

dilihat jarak perpindahan terjauh yaitu Kec. Bungus Teluk Kabung menuju kelurahan limau manis 25.42 Km. (Gambar 4.14).

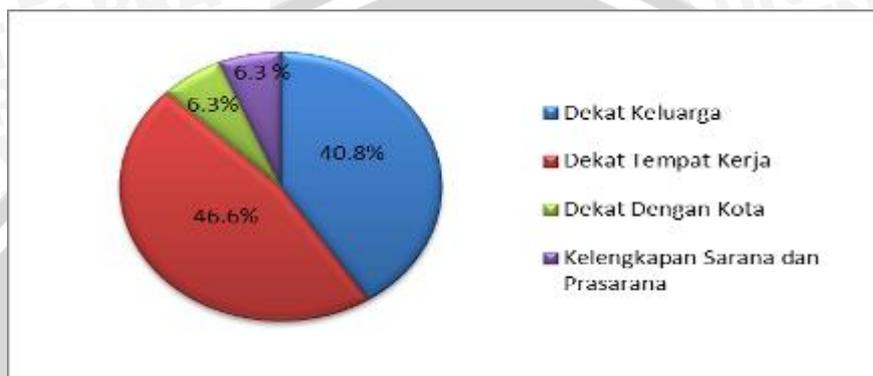


Gambar 4. 14 Peta Arah Orientasi Bermukim Kota Padang

Sumber: Hasil survei primer, 2013

A. Jarak

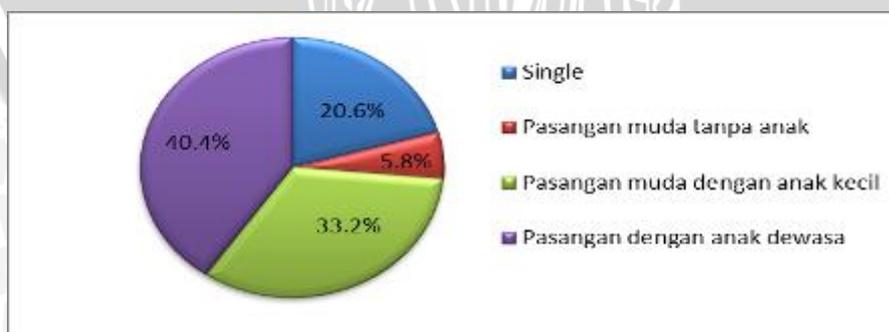
Menurut Kelley (2003), menjelaskan bahwa dalam pemilihan tempat tinggal harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain, dekat keluarga, tempat kerja, dekat kota, kelengkapan sarana. (**Gambar 4.15**) menunjukkan bahwa 46,6% masyarakat pesisir barat Kota Padang dalam pemilihan tempat tinggal, aspek yang sangat dipertimbangkan yaitu dekat dengan tempat kerja karena dapat meminimalisir biaya transportasi.



Gambar 4.15 Jarak terhadap pemilihan orientasi bermukim

B. Struktur keluarga

Menurut (Untermann.R & Small.R, 1983), dalam struktur keluarga ada empat kriteria yaitu penghuni tunggal (*single*), pasangan muda (tanpa anak), pasangan muda dengan anak kecil dan pasangan muda dengan anak sudah dewasa. (**Gambar 4.16**) menunjukkan bahwa sebanyak 40.4% struktur keluarga yang tinggal di pesisir barat Kota Padang didominasi oleh pasangan dengan anak dewasa.

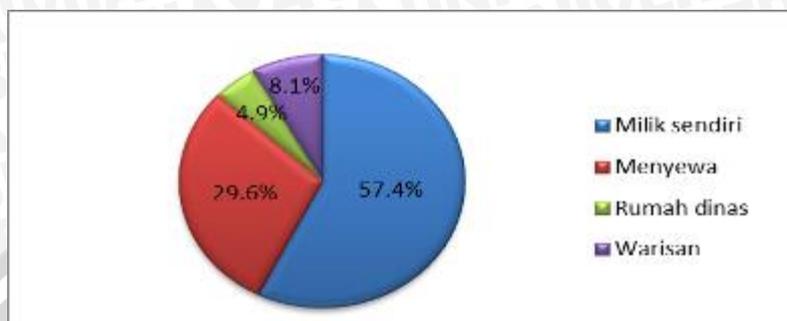


Gambar 4.16 Struktur Keluarga terhadap pemilihan orientasi bermukim

C. Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah oleh masyarakat terbagi menjadi empat yaitu milik sendiri, menyewa, warisan dan rumah dinas. (**Gambar 4.17**) menunjukkan bahwa kepemilikan

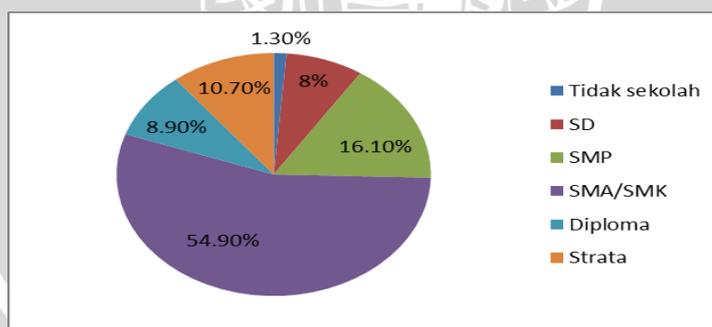
rumah masyarakat pesisir barat Kota Padang yang dominan adalah milik sendiri (57,4%). Hal itu dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi karena masyarakat yang memiliki rumah sendiri di pesisir barat Kota Padang cenderung berpenghasilan tinggi, karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang.



Gambar 4. 17 Kepemilikan rumah terhadap pemilihan orientasi bermukim

D. Pendidikan

Masyarakat pesisir barat Kota Padang mempunyai tingkat pendidikan dari tidak bersekolah hingga strata perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/SMK dengan persentase 54,9% (Gambar 4.18). Tingkat pendidikan berpengaruh pada pemahaman terhadap bencana, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mudah untuk memahami pengetahuan bencana dan sebaliknya.

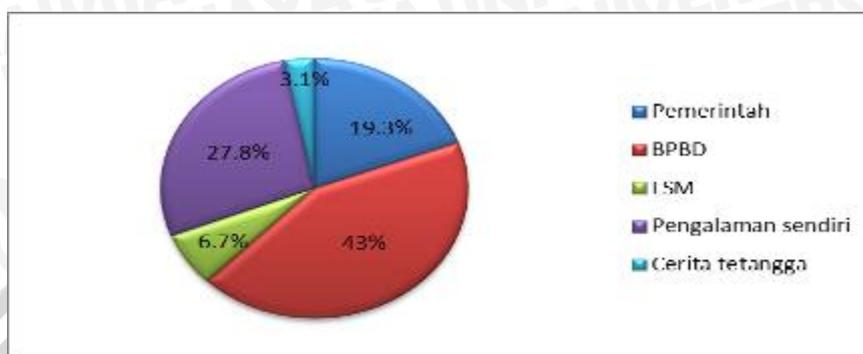


Gambar 4. 18 Pendidikan terhadap pemilihan orientasi bermukim

E. Pengetahuan informasi

Masyarakat pesisir barat Kota Padang mendapatkan sumber informasi terkait bencana tsunami dari pemerintah (Bappeda, Dinas Sosial, dan Pekerjaan Umum), BPBD, LSM, pengalaman sendiri, cerita tetangga. (Gambar 4.19) menunjukkan bahwa masyarakat pesisir barat Kota Padang mendapatkan sumber informasi dari BPBD (43%)

karena BPBD merupakan fasilitator utama dalam penyebaran informasi bahaya tsunami di Kota Padang. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam menyebarkan informasi dengan memasang peta jalur evakuasi dan papan informasi kebencanaan.



Gambar 4. 19 Pengetahuan informasi tentang rawan bencana

4.4.1 Peta Potensi bencana terhadap orientasi bermukim

A. Peta Potensi Bencana

Peta potensi bencana merupakan sebaran kawasan rawan bencana di Kota Padang yang terdiri dari peta patahan, peta longsor, peta rawan tsunami dan peta rawan banjir. **Gambar 4.20** menunjukkan bahwasan persebaran wilayah yang berpotensi bencana di Kota Padang (**Tabel 4.9**).

Tabel 4. 9 Persebaran Wilayah Potensi Bencana Berdasarkan Analisis Overlay

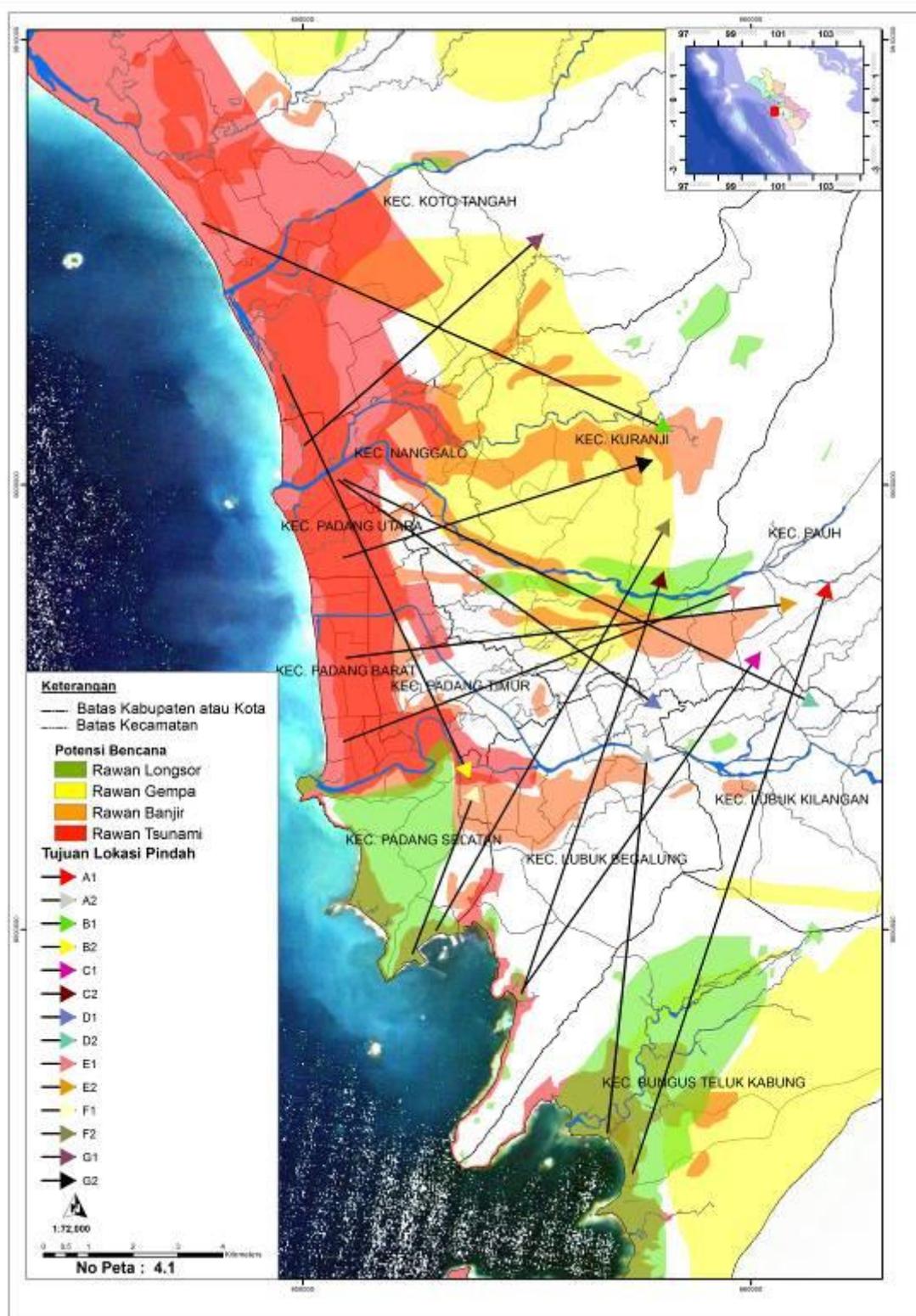
Potensi Bencana	Persebaran Wilayah	Luas
Tsunami	Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang selatan, Kecamatan Lubuk begalung dan Kecamatan Bungus teluk kabung	75.31 km ²
Banjir	Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus teluk Kabung	57.22 km ²
Longsor	Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Kranji dan Pauh	35.34 km ²
Gempa	Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Koto Tengah	95.91 km ²

Sumber: Hasil analisis, 2014

Tabel 4.9 menunjukkan potensi bencana terbesar di Kota Padang adalah bencana gempa dengan luas wilayah 95,31 km² yang tersebar di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Koto Tengah. Sementara potensi bencana terkecil terdapat pada bencana longsor yakni seluas 35,34 km² yang tersebar di

B. Peta orientasi bermukim terhadap peta potensi bencana

Peta orientasi bermukim terhadap besarnya potensi bencana tsunami dan banjir yang ada di pesisir barat Kota Padang (**Gambar 4.21**).



Gambar 4. 21 Peta Overlay Perubahan Orientasi Bermukim dan Potensi Bencana

Sumber: Hasil Analisis 2013

Gambar 4.21 menunjukkan bahwa arah perpindahan masyarakat dari tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung menuju lima kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Padang Selatan. Perpindahan yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya bukan solusi yang tepat karena masyarakat berpindah ke lokasi bencana baru (B1, B2, C2, F1, G2) yang selengkapnya dapat dilihat pada (**Gambar 4.21**). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman lebih lanjut terhadap kebencanaan terutama mengenai peta rawan bencana agar masyarakat tidak mengalami kepanikan

4.4.2 Analisis tabulasi silang dan uji *chi-square*

Analisis tabulasi silang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel kategori. Dalam penelitian ini digunakan uji *chi-square* untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Adapun yang akan diuji dalam penelitian adalah antar variabel keinginan pindah dengan jarak, hubungan keinginan pindah dengan struktur keluarga, hubungan keinginan pindah dengan status rumah, hubungan keinginan pindah dengan pendidikan, hubungan keinginan pindah dengan penyebaran informasi.

Kriteria pengujian menyebutkan apabila nilai probabilitas chi square \leq *level of significance* ($\alpha = \alpha$) maka dinyatakan ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut merupakan analisis hubungan keterkaitan antar variabel yang diduga mempunyai hubungan antara keinginan pindah dengan preverensi bermukim (**Tabel 4.10**).

Tabel 4. 10 Analisis Hubungan keterkaitan Variabel Kategori

Hubungan		Chi Square	Probabilitas
Variabel 1	Variabel 2		
Jarak	Keinginan Pindah	24.345	0.004
Struktur Keluarga	Keinginan Pindah	12.193	0.203
Status Rumah	Keinginan Pindah	36.889	0.000
Pendidikan	Keinginan Pindah	38.984	0.001
Informasi	Keinginan Pindah	27.247	0.007

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa terdapat variabel yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan keinginan pindah yaitu variabel struktur keluarga. Hal itu dikarenakan nilai *chi-square* sebesar 12.193 dengan probabilitas sebesar 0.203 menunjukkan probabilitas $>$ *level of significance* (alpha ($\alpha=5\%$)). Untuk nilai *chi square* $<$ *level of significance* (alpha ($\alpha=5\%$)) maka dapat dinyatakan variabel tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan dengan variabel keinginan pindah. Adapun variabel yang memiliki hubungan dan keterkaitan yaitu variabel jarak, status rumah, pendidikan dan informasi. Informasi pada penelitian ini menggambarkan sejauhmana pengetahuan responden akan bahaya stunami dan gempa yang mengancam di lingkungan permukimannya. **Gambar 4.19** memperlihatkan informasi kebencanaan didapatkan dari BPBD Kota Padang, Pemerintah Kota Padang (Dinas Sosial, PU, Bapeda, dll.). Hal ini menunjukkan bahwa BPBD dan Pemerintah Kota Padang berperan penting pada menyebarkan informasi kebencanaan pada masyarakat di Wilayah Pesisir Barat Kota Padang. Variabel struktur keluarga tidak dibahas dalam dalam penelitian ini karena tidak terdapat hubungan antara keinginan pindah.

4.4.3 Analisis korespondensi

Analisis korespondensi digunakan untuk memetakan hubungan dan keterkaitan antara dua variabel kategori dan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu keterkaitan peta rawan tsunami terhadap pemilihan orientasi bermukim responden.

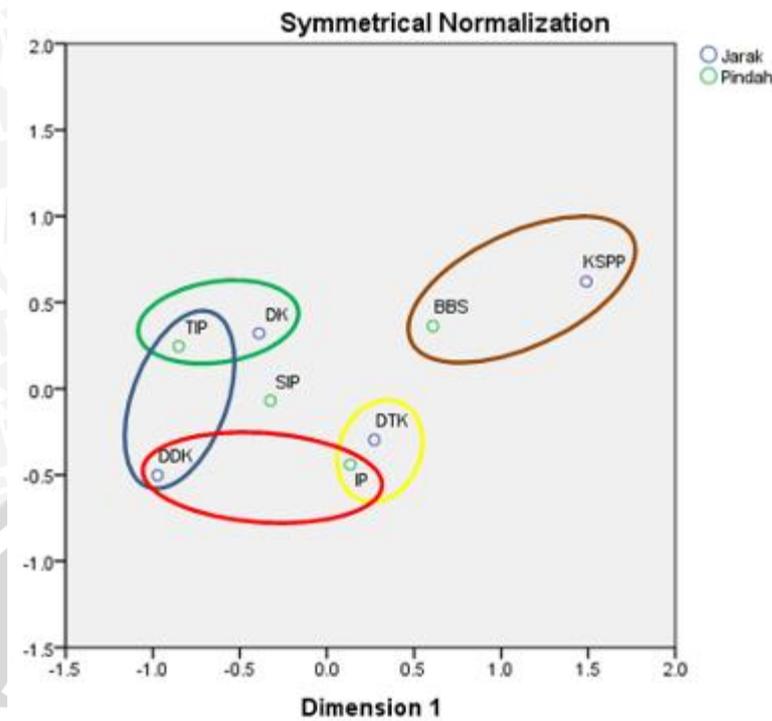
A. Korespondensi antara akseibilitas dengan keinginan pindah

Keinginan pindah terhadap jarak diukur dengan dekat keluarga (DK), dekat tempat kerja (DKT), harga terjangkau (HT), dekat dengan kota (DDK), kelengkapan sarana-prasarana (KSPP), dan lain-lain (LL) **Tabel 4.11.**

Tabel 4. 11 Tabulasi silang antara akseibilitas dengan keinginan pindah

Variabel	Kriteria	Jarak				Total
		Dekat keluarga (DK)	Dekat tempat kerja (DTK)	Dekat dengan kota (DDK)	Kelengkapan sarana dan prasarana (KSPP)	
Keinginan pindah	Sangat Ingin Pindah (SIP)	13.2%	11.5%	7.1%	0.0%	11.2%
	Ingin Pindah (IP)	28.6%	41.3%	42.9%	35.7%	35.9%
	Biasa-biasa saja (BBS)	26.4%	31.7%	7.1%	64.3%	30.0%
	Tidak ingin pindah (TIP)	31.9%	15.4%	42.9%	0.0%	22.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2014



Gambar 4.22 Analisis Korespondensi antara Aksesibilitas dengan Keinginan Pindah

Gambar 4.22 dan **Tabel 4.11** menjelaskan bahwa masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tidak ingin pindah dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan kota (42,9%) dan kedekatan keluarga sebesar (31,9%). Hal itu dikarenakan masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik antara tempat tinggal dan dekat keluarga. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang ingin pindah dipengaruhi oleh dekat dengan kota sebesar (42,9%) dan dekat tempat kerja sebesar (41,3%). Hal itu dikarenakan masyarakat sudah tidak nyaman lagi tinggal dekat dengan kota dan dekat tempat kerja akibat pengaruh peta rawan tsunami dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang memilih biasa-biasa saja dipengaruhi oleh kelengkapan sarana dan prasarana sebesar (64,3%) karena kelengkapan fasilitas seperti pusat perbelanjaan, sekolah, bandara, dan lain-lain, yang ada didekat daerah rawan bencana sehingga masyarakat enggan untuk berkeinginan untuk pindah.

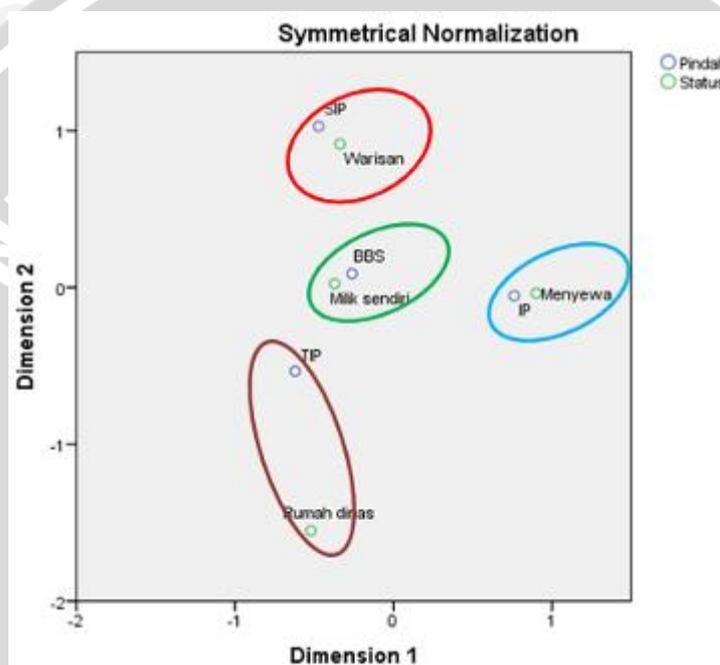
B. Korespondensi antara kepemilikan rumah dengan keinginan pindah

Keinginan pindah terhadap kepemilikan rumah diukur dengan parameter milik sendiri, menyewa, warisan dan rumah dinas (**Tabel 4.12**).

Tabel 4. 12 Tabulasi silang antara Kepemilikan Rumah dengan Keinginan Pindah

Variabel	Kriteria	Kepemilikan rumah				Total
		Milik sendiri	Menyewa	Rumah dinas	Warisan	
Keinginan pindah	Sangat Ingin Pindah (SIP)	12.5%	6.1%	0.0%	27.8%	11.2%
	Ingin Pindah (IP)	25.0%	60.6%	27.3%	27.8%	35.9%
	Biasa-biasa saja (BBS)	35.9%	22.7%	18.2%	22.2%	30.0%
	Tidak ingin pindah (TIP)	26.6%	10.6%	54.5%	22.2%	22.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber : Hasil Analisis 2014

**Gambar 4. 23 Analisis Korespondensi antara Status Rumah dengan Keinginan Pindah**

Gambar 4.23 dan **Tabel 4.12** menjelaskan bahwa masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tinggal di rumah dinas (54.5%) tidak ingin pindah karena orang yang menetap di rumah dinas hanya bersifat sementara (ikatan dinas), mereka baru akan pindah sesuai dengan perintah atasan. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang berstatus menyewa rumah (60%) ingin pindah karena orang yang menyewa hanya menetap sementara (belum mempunyai rumah tetap) dan masih ingin mencari rumah yang lebih aman dari ancaman bencana tsunami. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang memiliki rumah sendiri (35,9%) bersikap biasa-biasa saja karenakan masyarakat yang memiliki rumah sendiri menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha dalam mencari nafkah. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang dengan status rumah warisan (27,8%) sangat ingin pindah karena masyarakat yang

tinggal dirumah warisan tidak nyaman tinggal di daerah rawan tsunami dan mencari daerah yang lebih aman.

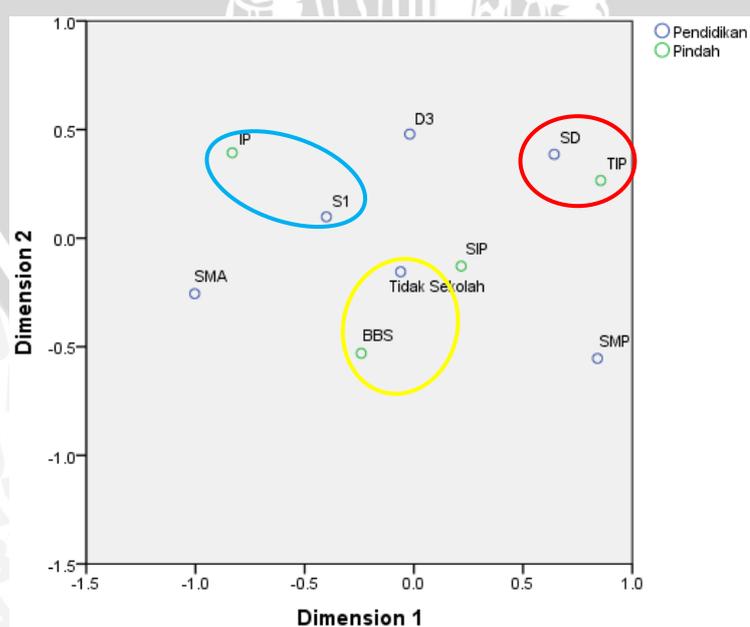
C. Korespondensi antara Pendidikan dengan Keinginan Pindah

Keinginan pindah terhadap tingkat pendidikan di ukur dengan parameter tingkat sekolah, SD, SMP, SMA, D3, dan S1 (Tabel 4.13). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan sangat berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan bencana.

Tabel 4. 13 Tabulasi silang antara Pendidikan dengan Keinginan Pindah

Variabel	Kriteria	Tingkat pendidikan					Total	
		Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	D3		S1
Keinginan pindah	Sangat Ingin Pindah (SIP)	0.0%	5.6%	20.0%	8.9%	15.0%	12.5%	11.2%
	Ingin Pindah (IP)	33.3%	16.7%	11.4%	41.5%	45.0%	50.0%	35.9%
	Biasa-biasa saja (BBS)	66.7%	16.7%	31.4%	33.3%	15.0%	29.2%	30.0%
	Tidak ingin pindah (TIP)	0.0%	61.1%	37.1%	16.3%	25.0%	8.3%	22.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber : Hasil Analisis 2014



Gambar 4. 24 Analisis Korespondensi antara Pendidikan dengan Keinginan Pindah

Gambar 4.24 dan **Tabel 4.13** menjelaskan bahwa masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tidak ingin pindah umumnya mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar (61,1%) karena masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah kurang memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang berpendidikan strata satu (50%) ingin pindah karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga pemahaman terhadap kebencanaan. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tidak sekolah (66,7%) memilih biasa-biasa saja karena tingkat pendidikan yang sangat rendah mempengaruhi dalam mencerna informasi kebencanaan dan menjadi acuh terhadap informasi yang disampaikan pemerintah.

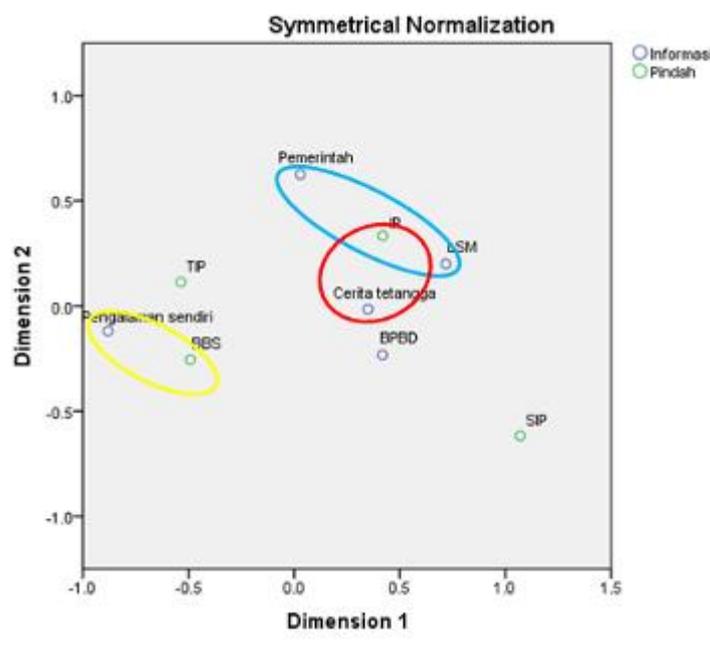
D. Korespondensi antara Informasi dengan Keinginan Pindah

Keinginan pindah terhadap penyebaran informasi diukur dengan parameter pemerintah, BPBD, LSM, pengalaman, cerita tetangga dapat dilihat pada (**Tabel 4.14**). **Gambar 4.25** dan **Tabel 4.14** menjelaskan bahwa masyarakat pesisir barat Kota Padang yang mendapat informasi dari LSM (46,7%), pemerintah (44,2%) dan cerita tetangga (42,9%) ingin pindah karena membuat masyarakat takut dan resah tinggal di daerah rawan tsunami contohnya surat edaran gubernur tentang siaga gempa dan tsunami. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang mendapat informasi dari pengalaman sendiri sebesar (43,5%) bersikap biasa-biasa saja karena masyarakat sudah biasa mengalami kejadian tersebut.

Tabel 4. 14 Tabulasi silang antara Informasi dengan Keinginan Pindah

Variabel	Kriteria	Penyebaran Informasi					Total
		Pemerintah	BPBD	LSM	Pengalaman	Cerita tetangga	
Keinginan pindah	Sangat Ingin Pindah (SIP)	7.0%	17.7%	20.0%	1.6%	14.3%	11.2%
	Ingin Pindah (IP)	44.2%	39.6%	46.7%	21.0%	42.9%	35.9%
	Biasa-biasa saja (BBS)	25.6%	26.0%	13.3%	43.5%	28.6%	30.0%
	Tidak ingin pindah (TIP)	23.3%	16.7%	20.0%	33.9%	14.3%	22.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100.0%

Sumber : Hasil Analisis 2014



Gambar 4.25 Analisis Korespondensi antara Informasi dengan Keinginan Pindah

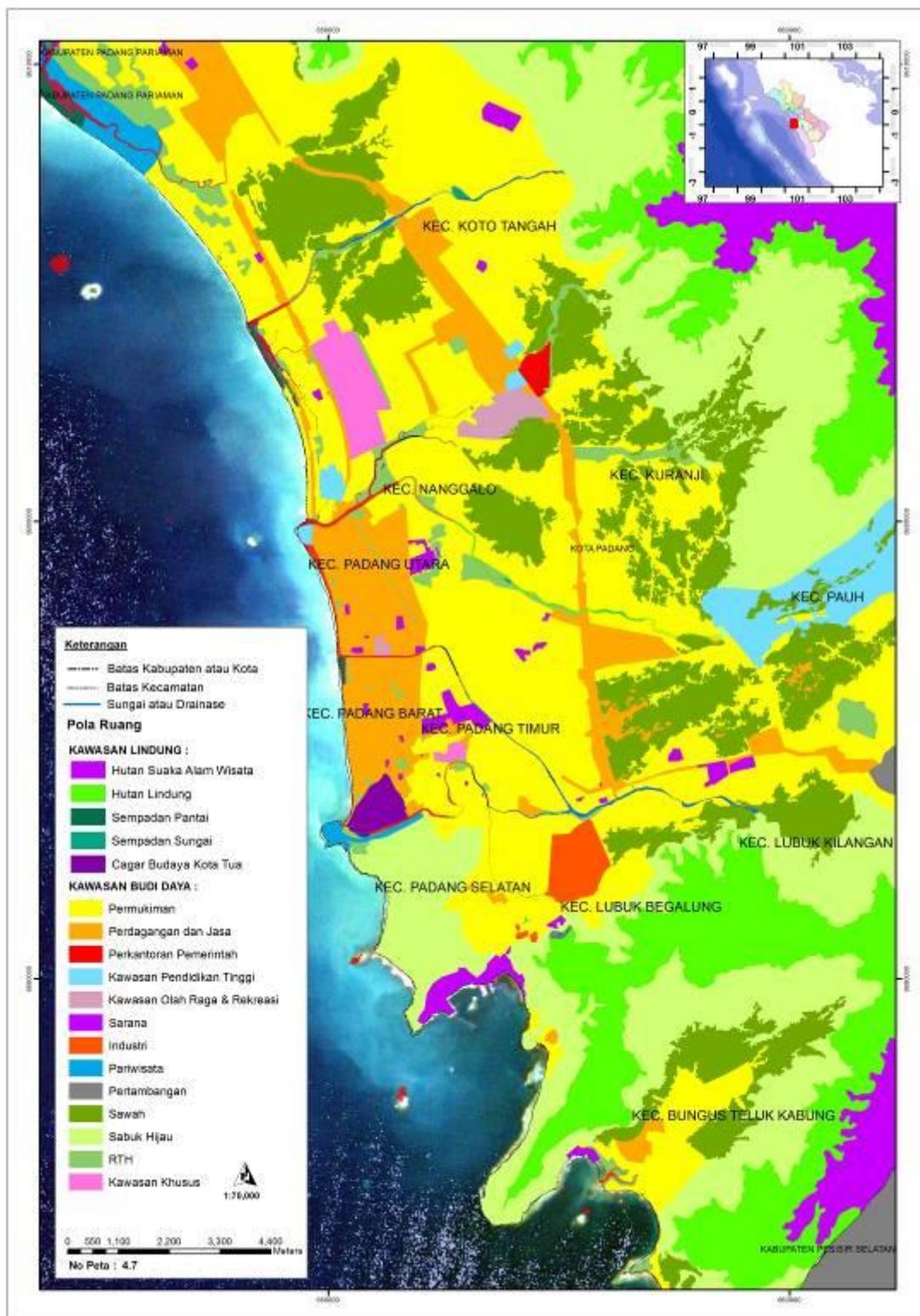
4.5 Pengaruh Orientasi Bermukim Terhadap Pola Ruang Kota Padang

Pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang berfungsi untuk (RTRW Kota Padang, Tahun 2010-2030)

1. Untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota
2. Mengatur keseimbangan peruntukan ruang
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 tahun
4. Sebagai acuan pemberi izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota

4.5.1 Analisis pola ruang terhadap orientasi bermukim dan potensi bencana

Overlay pola ruang dengan orientasi bermukim dan potensi bencana digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, bagaimana orientasi bermukim masyarakat di daerah pesisir barat Kota Padang terhadap pola ruang RTRW Kota Padang sehingga dapat melihat perubahan orientasi bermukim potensi bencana terhadap pola ruang. **(Gambar 4.26)** merupakan pola ruang Kota Padang terbagi dua yaitu kawasan lindung dan budidaya dengan persentase 75,79% untuk kawasan lindung dan 45,34% untuk kawasan budidaya.



Gambar 4. 26 Peta Pola Ruang Kota Padang

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

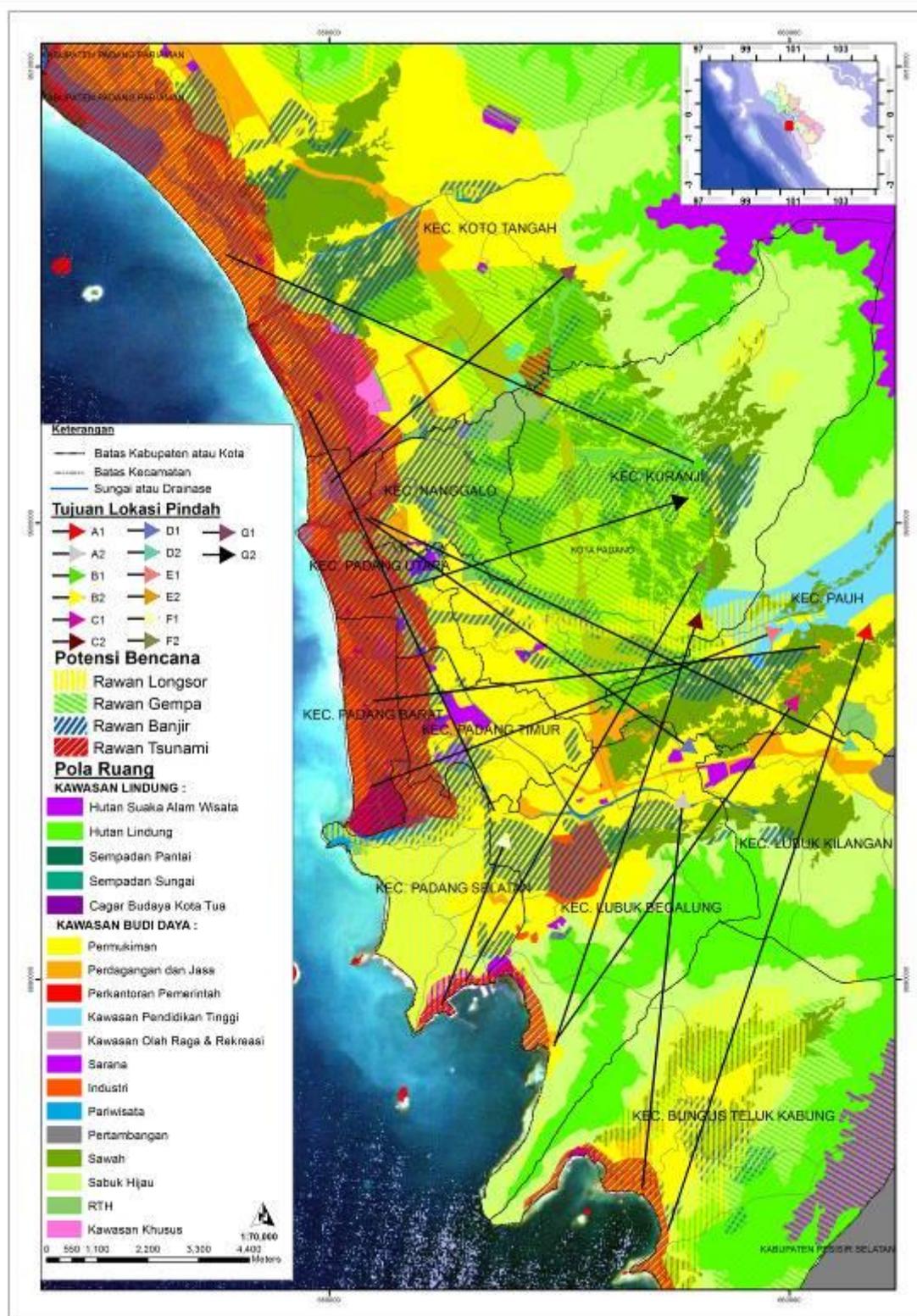
Gambar 4.26 pola ruang Kota Padang menunjukkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa, pemukiman dan sarana dan prasarana tersebar disepanjang pesisir barat Kota

Padang sehingga sangat rentan terhadap bahaya tsunami yang akan menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat besar kalau terjadi tsunami. Sehingga perlunya evaluasi dalam pengembangan wilayah yang menjauhi pesisir pantai barat Kota Padang. Untuk masing-masing persebaran wilayah berdasarkan pola ruang (**Tabel 4.15**).

Tabel 4. 15 Persebaran Wilayah Berdasarkan Pola Ruang

Pola Ruang	Persebaran Wilayah
Kawasan Lindung	
Hutan Suaka Alam Wisata	Kec. Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Hutan Lindung	Kec. Koto Tengah, Kec. Kuranji, Kec. Pauh, Kec. Lubuk Begalung, dan Kec. Bungus Teluk Kabung dan Kec. Lubuk Kilangan
Sempadan Pantai	Kec. Padang Barat, dan Kec. Koto Tengah
Sempadan Sungai	Kec. Koto Tengah
Cagar Budaya Kota Tua	Kec. Padang Barat
Kawasan Budidaya	
Pemukiman	Bungus teluk kabung, Lb kilangan, Lb begalung, Padang selatan, Padang timur, Padang utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, dan Koto tengah
Perdagangan Dan Jasa	Kec.Bungus teluk kabung, Kec. Lb kilangan, Kec.Lb begalung, Kec.Padang selatan, Kec.Padang Barat, Kec.Padang timur, Kec.Padang utara, Kec.Nanggalo, Kec.Kuranji, Kec.Pauh, dan Kec.Koto tengah
Perkantoran Pemerintah	Kec. Koto Tengah
Kawasan Pendidikan Tinggi	Kec. Pauh, Kec. Kuranji, Kec. Padang Utara, dan Kec.Koto Tengah
Kawasan Olah raga dan Rekreasi	Kec. Nanggalo, Kec. Kuranji, Kec. Kec.Padang Barat
Sarana	Kec.Bungus teluk kabung, Kec. Lb kilangan, Kec. Lb begalung, Kec. Padang selatan, Kec.Padang Barat, Kec. Padang timur, Kec.Padang utara, Kec. Nanggalo, Kec. Kuranji, Kec.Pauh, dan Kec.Koto tengah
Industri	Kec. Lubuk Begalung
Pariwisata	Kec. Padang Selatan, dan Kec. Koto Tengah
Pertambangan Sawah	Kec. Lubuk Kilangan
Sabuk Hijau	Kec. Koto Tengah, Nanggalo, Kec. Kuranji, Kec. Pauh, Kec. Lubuk Begalung, Kec. Bungus Teluk Kabung,
RTH	Kec. Lubuk Begalung, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kec. Padang Selatan, Kec. Padang Barat, Kec. Padang Timur, Kec. Pauh, Kec. Padang Utara, Kec. Nanggalo, Kec. Kuranji, dan Kec. Koto Tengah
Kawasan Khusus	Kec. Kotongah, dan Padang Timur.

Untuk membuat pola ruang yang tanggap terhadap bencana sehingga dilakukan teknik *overlay* pola ruang Kota Padang terhadap potensi bencana dan peta orientasi bermukim (**Gambar 4.27**).



Gambar 4. 27 Peta Tanggap Bencana di Kota Padang

Sumber: Hasil analisis, 2014

Gambar 4.27 menunjukkan perubahan orientasi bermukim penduduk masih sesuai dengan pola ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan peta potensi bencana (**Gambar 4.20**), perpindahan penduduk pasca desiminasi peta rawan bencana tsunami mengarah di kawasan bencana lainya seperti gempa, longsor dan banjir, contoh (**Gambar 4.21**). Kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena mereka tetap tinggal di wilayah rawan bencana. Perpindahan penduduk dari Kecamatan Koto Tangah menuju Kelurahan Kuranji (Kecamatan Kuranji) adalah penduduk yang pindah dari zona bahaya tsunami ke daerah potensi banjir dan gempa.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa pola ruang Kota Padang belum mengakomodir bencana dengan baik, karena pola ruang seharusnya mengakomodasi potensi bencana seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.*

Selain mengacu kepada pola ruang, peta tanggap bencana Kota Padang juga harus membuat masyarakat pesisir barat Kota Padang mengerti, salah satunya melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami sebab informasi yang diberikan pemerintah dalam pengurangan resiko bencana tidak selamanya bersifat positif karena telah menimbulkan perubahan orientasi bermukim masyarakat di Kota Padang sehingga perlunya kajian dan evaluasi yang lebih dalam terkait penyampaian informasi oleh pemerintah agar tidak membuat masyarakat salah dalam menanggapi informasi kebencanaan.